



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 menyatakan antara lain bahwa Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022 yang antara lain digunakan untuk a. pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan, b. penciptaan lapangan kerja dan/atau c. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. Belanja wajib tersebut di atas dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022. Belanja wajib tersebut dianggarkan dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 10);

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini beserta Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4	PENDAPATAN DAERAH	4,000,115,968,022.00	4,000,115,968,022.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,715,555,007,022.00	1,715,555,007,022.00
	Bertambah/Berkurang		
	Jumlah.....		
4.1.01	Pajak Daerah	1,136,543,855,914.00	
	Bertambah/Berkurang		
	Jumlah.....		
4.1.02	Retribusi Daerah	480,410,016,800.00	
	Bertambah/Berkurang		
	Jumlah.....		
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50,838,250,000.00	
	Bertambah/Berkurang		
	Jumlah.....		
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	47,762,884,308.00	
	Bertambah/Berkurang		
	Jumlah.....		

4.2	PENDAPATAN TRANSFER Bertambah/Berkurang Jumlah.....	2,284,560,961,000.00	2,284,560,961,000.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Bertambah/Berkurang Jumlah.....	2,284,560,961,000.00	
5	BELANJA	4,154,135,993,626.00	4,154,135,993,626.00
5.1	BELANJA OPERASI Bertambah/Berkurang Jumlah.....	2,781,539,265,301.00 3,180,530,872.00 2,784,719,796,173.00	2,784,719,796,173.00
5.1.01	Belanja Pegawai Bertambah/Berkurang Jumlah.....	1,381,765,918,482.00 -5,432,913,616.00 1,376,333,004,866.00	1,376,333,004,866.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa Bertambah/Berkurang Jumlah.....	1,126,001,185,912.00 4,691,660,019.00 1,130,692,845,931.00	1,130,692,845,931.00
5.1.03	Belanja Bunga Bertambah/Berkurang Jumlah.....	63,390,249,880.00 0.00 63,390,249,880.00	
5.1.04	Belanja Subsidi Bertambah/Berkurang Jumlah.....	4,375,000,000.00 905,900,000.00 5,280,900,000.00	5,280,900,000.00
5.1.05	Belanja Hibah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	203,771,911,027.00 3,015,884,469.00 206,787,795,496.00	206,787,795,496.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial Bertambah/Berkurang Jumlah.....	<u>2,235,000,000.00</u> 0.00 0.00	
5.2	BELANJA MODAL Bertambah/Berkurang Jumlah.....	<u>828,836,691,491.00</u> 0.00 828,836,691,491.00	828,836,691,491.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	<u>53,552,397,942.00</u> 0.00 53,552,397,942.00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bertambah/Berkurang Jumlah.....	<u>184,519,461,897.00</u> 0.00 184,519,461,897.00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Bertambah/Berkurang Jumlah.....	<u>337,530,610,708.00</u> 0.00 337,530,610,708.00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Bertambah/Berkurang Jumlah.....	<u>235,346,679,324.00</u> 0.00 235,346,679,324.00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bertambah/Berkurang Jumlah.....	<u>17,887,541,620.00</u> 0.00 17,887,541,620.00	

5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9,508,656,098.00	6,328,125,226.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9,508,656,098.00	
	Bertambah/Berkurang	<u>-3,180,530,872.00</u>	
	Jumlah.....	6,328,125,226.00	
5.4	BELANJA TRANSFER	534,251,380,736.00	534,251,380,736.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	529,251,380,736.00	
	Bertambah/Berkurang	<u>0.00</u>	
	Jumlah.....	0.00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	5,000,000,000.00	
	Bertambah/Berkurang	<u>0.00</u>	
	Jumlah.....	0.00	
	Total Surplus/(Defisit)	-154,020,025,604.00	-154,020,025,604.00
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	371,488,083,857.00	371,488,083,857.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	176,266,774,027.00	176,266,774,027.00
	Bertambah/Berkurang	<u>0.00</u>	
	Jumlah.....	176,266,774,027.00	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	195,221,309,830.00	195,221,309,830.00
	Bertambah/Berkurang	<u>0.00</u>	
	Jumlah.....	195,221,309,830.00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	217,468,058,253.00	217,468,058,253.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	31,750,000,000.00	
	Bertambah/Berkurang	<u>0.00</u>	
	Jumlah.....	0.00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	185,718,058,253.00	
	Bertambah/Berkurang	<u>0.00</u>	
	Jumlah.....	0.00	
	Pembiayaan Netto	154,020,025,604.00	154,020,025,604.00
	Bertambah/Berkurang	<u>0.00</u>	
	Jumlah.....	0.00	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0.00	0.00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

No	PENGOLAH	PARAF
1	KASUBBID PENYUSUNAN APBD	
2	KEPALA BIDANG ANGGARAN	
3	SEKRETARIS BKAD	
4	KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM SETDA PROV.SULUT	
5	KEPALA BIRO HUKUM	
6	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
7	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8	Pj. SEKRETARIS DAERAH	
9.	WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	
10.	GUBERNUR SULAWESI UTARA	 Mohon ditandatangani

Ditetapkan di Manado.

Pada tanggal 7 Oktober Tahun 2022

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado.

pada tanggal 7 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,



PRASENO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 13

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.

Pada tanggal 7 October Tahun 2022

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado.

pada tanggal 7 October 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,



PRASENO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 OKTOBER 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5(4-3)	6
4	PENDAPATAN DAERAH	4,000,115,968,022.00	4,000,115,968,022.00	-	0.00%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,715,555,007,022.00	1,715,555,007,022.00	-	0.00%
4.1.01	Pajak Daerah	1,136,543,855,914.00	1,136,543,855,914.00	-	0.00%
4.1.02	Retribusi Daerah	480,410,016,800.00	480,410,016,800.00	-	0.00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50,838,250,000.00	50,838,250,000.00	-	0.00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	47,762,884,308.00	47,762,884,308.00	-	0.00%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,284,560,961,000.00	2,284,560,961,000.00	-	0.00%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,284,560,961,000.00	2,284,560,961,000.00	-	0.00%
5	BELANJA DAERAH	4,154,135,993,626.00	4,154,135,993,626.00	-	0.00%
5.1	BELANJA OPERASI	2,781,539,265,301.00	2,784,719,796,173.00	3,180,530,872.00	0.11%
5.1.01	Belanja Pegawai	1,381,765,918,482.00	1,376,333,004,866.00	(5,432,913,616.00)	-0.39%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,126,001,185,912.00	1,130,692,845,931.00	4,691,660,019.00	0.42%
5.1.03	Belanja Bunga	63,390,249,880.00	63,390,249,880.00	-	0.00%
5.1.04	Belanja Subsidi	4,375,000,000.00	5,280,900,000.00	905,900,000.00	20.71%
5.1.05	Belanja Hibah	203,771,911,027.00	206,787,795,496.00	3,015,884,469.00	1.48%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2,235,000,000.00	2,235,000,000.00	-	0.00%
5.2	BELANJA MODAL	828,836,691,491.00	828,836,691,491.00	-	0.00%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	53,552,397,942.00	53,552,397,942.00	-	0.00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184,519,461,897.00	184,519,461,897.00	-	0.00%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	337,530,610,708.00	337,530,610,708.00	-	0.00%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235,346,679,324.00	235,346,679,324.00	-	0.00%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17,887,541,620.00	17,887,541,620.00	-	0.00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9,508,656,098.00	6,328,125,226.00	(3,180,530,872.00)	-33.45%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9,508,656,098.00	6,328,125,226.00	(3,180,530,872.00)	-33.45%
5.4	BELANJA TRANSFER	534,251,380,736.00	534,251,380,736.00	-	0.00%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	529,251,380,736.00	529,251,380,736.00	-	0.00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	0.00%
	Total Surplus/(Defisit)	(154,020,025,604.00)	(154,020,025,604.00)	-	0.00%
6	PEMBIAYAAN				

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5(4-3)	6
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	371,488,083,857.00	371,488,083,857.00	-	0.00%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	176,266,774,027.00	176,266,774,027.00	-	0.00%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	195,221,309,830.00	195,221,309,830.00	-	0.00%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	217,468,058,253.00	217,468,058,253.00	-	0.00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	31,750,000,000.00	31,750,000,000.00	-	0.00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	185,718,058,253.00	185,718,058,253.00	-	0.00%
	Pembiayaan Netto	154,020,025,604.00	154,020,025,604.00	-	0.00%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkena	-	-	-	0.00%

No	PENGOLAH	PARAF
1	KASUBBID PENYUSUNAN APBD	
2	KEPALA BIDANG ANGGARAN	
3	SEKRETARIS BKAD	
4	KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM SETDA PROV. SULUT	
5	KEPALA BIRO HUKUM	
6	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
7	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8	Pj. SEKRETARIS DAERAH	
9	WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	
10	GUBERNUR SULAWESI UTARA	Mohan dandatangani

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5(4-3)	6
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	371,488,083,857.00	371,488,083,857.00	-	0.00%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	176,266,774,027.00	176,266,774,027.00	-	0.00%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	195,221,309,830.00	195,221,309,830.00	-	0.00%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	217,468,058,253.00	217,468,058,253.00	-	0.00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	31,750,000,000.00	31,750,000,000.00	-	0.00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	185,718,058,253.00	185,718,058,253.00	-	0.00%
	Pembiayaan Netto	154,020,025,604.00	154,020,025,604.00	-	0.00%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkena	-	-	-	0.00%

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 OKTOBER 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR
40 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE REKENING										URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2										3	4	5	6(5-4)
1	DINAS PENDIDIKAN											27.272.882.000	21.839.968.384	-5.432.913.616
	1	1	1.01	0	0	0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	27.272.882.000	21.839.968.384	-5.432.913.616
	1	1	1.01	1	0	0					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.272.882.000	21.839.968.384	-5.432.913.616
	1	1	1.01	1	1	0					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.272.882.000	21.839.968.384	-5.432.913.616
	1	1	1.01	1	1	1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.272.882.000	21.839.968.384	-5.432.913.616
	1	1	1.01	1	1	1	5	1			BELANJA OPERASI	27.272.882.000	21.839.968.384	-5.432.913.616
	1	1	1.01	1	1	1	5	1	1		Belanja Pegawai	27.272.882.000	21.839.968.384	-5.432.913.616
	1	1	1.01	1	1	1	5	1	1	2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	27.272.882.000	21.839.968.384	-5.432.913.616
	1	1	1.01	1	1	1	5	1	1	2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	27.272.882.000	21.839.968.384	-5.432.913.616
	1	6	1.06	5	1	1	5	1	2	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	27.272.882.000	21.839.968.384	-5.432.913.616
2	DINAS SOSIAL											3.950.420.000	6.827.620.019	2.877.200.019
	1	6	1.06	0	0	0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.950.420.000	6.827.620.019	2.877.200.019
	1	6	1.06	5	0	0					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.757.480.000	6.257.080.000	2.499.600.000
	1	6	1.06	5	1	0					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.757.480.000	6.257.080.000	2.499.600.000
	1	6	1.06	5	1	1					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.677.480.000	4.737.080.000	2.059.600.000
	1	6	1.06	5	1	1	5	1			BELANJA OPERASI	2.677.480.000	4.737.080.000	2.059.600.000
	1	6	1.06	5	1	1	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	2.677.480.000	4.737.080.000	2.059.600.000
	1	6	1.06	5	1	1	5	1	2	1	Belanja Barang	2.677.480.000	4.737.080.000	2.059.600.000
	1	6	1.06	5	1	1	5	1	2	1	Belanja Barang Pakai Habis	2.677.480.000	4.737.080.000	2.059.600.000
	1	6	1.06	5	1	1	5	1	2	1	Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	2.677.480.000	4.737.080.000	2.059.600.000
	1	6	1.06	5	1	3					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.080.000.000	1.520.000.000	440.000.000

NO	KODE REKENING											URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2											3	4	5	6(5-4)	
	1	6	1.06.	5	1	3	5	1					BELANJA OPERASI	1.080.000.000	1.520.000.000	440.000.000
	1	6	1.06.	5	1	3	5	1	2				Belanja Barang dan Jasa	1.080.000.000	1.520.000.000	440.000.000
	1	6	1.06.	5	1	3	5	1	2	1			Belanja Barang	1.080.000.000	1.520.000.000	440.000.000
	1	6	1.06.	5	1	3	5	1	2	1	1		Belanja Barang Pakai Habis	1.080.000.000	1.520.000.000	440.000.000
	1	6	1.06.	5	1	3	5	1	2	1	1	39	Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	1.080.000.000	1.520.000.000	440.000.000
	1	6	1.06	6	0	0							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	192.940.000	570.540.019	377.600.019
	1	6	1.06.	6	1	0							Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	192.940.000	570.540.019	377.600.019
	1	6	1.06	6	1	1							Penyediaan Permakanan	192.940.000	570.540.019	377.600.019
	1	6	1.06.	6	1	1	5	1					BELANJA OPERASI	192.940.000	570.540.019	377.600.019
	1	6	1.06.	6	1	1	5	1	2				Belanja Barang dan Jasa	192.940.000	570.540.019	377.600.019
	1	6	1.06.	6	1	1	5	1	2	1			Belanja Barang	192.940.000	570.540.019	377.600.019
	1	6	1.06.	6	1	1	5	1	2	1	1		Belanja Barang Pakai Habis	192.940.000	570.540.019	377.600.019
	1	6	1.06.	6	1	1	5	1	2	1	1	39	Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	192.940.000	570.540.019	377.600.019
3	DINAS PEKERJAAN UMUM												14.500.000.000	17.126.823.069	2.626.823.069	
	2	7	2.07	0	0	0							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14.500.000.000	17.126.823.069	2.626.823.069
	2	7	2.07	5	0	0							PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	14.500.000.000	17.126.823.069	2.626.823.069
	2	7	2.07	5	1	0							Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	14.500.000.000	17.126.823.069	2.626.823.069
	2	7	2.07	5	1	5							Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	14.500.000.000	17.126.823.069	2.626.823.069
	2	7	2.07.	5	1	5	5	1					BELANJA OPERASI	14.500.000.000	17.126.823.069	2.626.823.069
	2	7	2.07.	5	1	5	5	1	5				Belanja Hibah	14.500.000.000	17.126.823.069	2.626.823.069
	2	7	2.07.	5	1	5	5	1	5	3			Belanja Hibah kepada BUMN	14.500.000.000	17.126.823.069	2.626.823.069
	2	7	2.07.	5	1	5	5	1	5	3	1		Belanja Hibah Uang kepada BUMN	14.500.000.000	17.126.823.069	2.626.823.069
	2	7	2.07.	5	1	5	5	1	5	3	1	1	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	14.500.000.000	17.126.823.069	2.626.823.069

NO	KODE REKENING										URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2										3	4	5	6(5-4)		
4	DINAS PANGAN											75.000.000	351.400.000	276.400.000		
	2	9	2.09	0	0	0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	75.000.000	351.400.000	276.400.000		
	2	9	2.09	3	0	0					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	75.000.000	351.400.000	276.400.000		
	2	9	2.09	3	1	0					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	75.000.000	351.400.000	276.400.000		
	2	9	2.09	3	1	5					Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	75.000.000	351.400.000	276.400.000		
	2	9	2.09	3	1	5	5	1			BELANJA OPERASI	75.000.000	351.400.000	276.400.000		
	2	9	2.09	3	1	5	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	0	46.400.000	46.400.000		
	2	9	2.09	3	1	5	5	1	2	2	Belanja Jasa	0	46.400.000	46.400.000		
	2	9	2.09	3	1	5	5	1	2	2	4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	46.400.000	46.400.000	
	2	9	2.09	3	1	5	5	1	2	2	4	37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0	34.000.000	34.000.000
	2	9	2.09	3	1	5	5	1	2	2	4	52	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0	12.400.000	12.400.000
	2	9	2.09	3	1	5	5	1	4		Belanja Subsidi	75.000.000	305.000.000	230.000.000		
	2	9	2.09	3	1	5	5	1	4	4	Belanja Subsidi kepada Koperasi	75.000.000	305.000.000	230.000.000		
	2	9	2.09	3	1	5	5	1	4	4	1	Belanja Subsidi kepada Koperasi	75.000.000	305.000.000	230.000.000	
	2	9	2.09	3	1	5	5	1	4	4	1	1	Belanja Subsidi Kepada Koperasi	75.000.000	305.000.000	230.000.000
5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH											0	389.061.400	389.061.400		
	2	17	2.17	0	0	0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	389.061.400	389.061.400		
	2	17	2.17	8	0	0					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0	389.061.400	389.061.400		

NO	KODE REKENING											URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2											3	4	5	6(5-4)
	2	17	2.17	8	1	0						Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	0	389.061.400	389.061.400
	2	17	2.17	8	1	1						Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	0	389.061.400	389.061.400
	2	17	2.17	8	1	1	5	1				BELANJA OPERASI	0	389.061.400	389.061.400
	2	17	2.17	8	1	1	5	1	5			Belanja Hibah	0	389.061.400	389.061.400
	2	17	2.17	8	1	1	5	1	5	5		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0	389.061.400	389.061.400
	2	17	2.17	8	1	1	5	1	5	5	1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0	300.000.000	300.000.000
	2	17	2.17	8	1	1	5	1	5	5	1	Hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan	0	300.000.000	300.000.000
	2	17	2.17	8	1	1	5	1	5	5	2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0	89.061.400	89.061.400
	2	17	2.17	8	1	1	5	1	5	5	2	Hibah uang kepada badan dan lembaga yang nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	0	89.061.400	89.061.400
6	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN												530.510.000	1.720.570.000	1.190.060.000
	3	27	3.27	0	0	0						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	530.510.000	1.720.570.000	1.190.060.000
	3	27	3.27	2	0	0						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	530.510.000	1.720.570.000	1.190.060.000
	3	27	3.27	2	1	0						Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	0	200.000.000	200.000.000
	3	27	3.27	2	1	1						Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	0	200.000.000	200.000.000
	3	27	3.27	2	1	1	5	1				BELANJA OPERASI	0	200.000.000	200.000.000
	3	27	3.27	2	1	1	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	0	200.000.000	200.000.000

NO	KODE REKENING											URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2											3	4	5	6(5-4)	
	3	27	3.27.	2	1	1	5	1	2	1			Belanja Barang	0	200.000.000	200.000.000
	3	27	3.27.	2	1	1	5	1	2	1	1		Belanja Barang Pakai Habis	0	200.000.000	200.000.000
	3	27	3.27.	2	1	1	5	1	2	1	1	2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0	200.000.000	200.000.000
	3	27	3.27	2	1	0							Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	0	810.060.000	810.060.000
	3	27	3.27	2	1	2							Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	0	810.060.000	810.060.000
	3	27	3.27.	2	1	2	5	1					BELANJA OPERASI	0	810.060.000	810.060.000
	3	27	3.27.	2	1	2	5	1	2				Belanja Barang dan Jasa	0	810.060.000	810.060.000
	3	27	3.27.	2	1	2	5	1	2	1			Belanja Barang	0	810.060.000	810.060.000
	3	27	3.27.	2	1	2	5	1	2	1	1		Belanja Barang Pakai Habis	0	810.060.000	810.060.000
	3	27	3.27.	2	1	2	5	1	2	1	1	2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0	82.500.000	82.500.000
	3	27	3.27.	2	1	2	5	1	2	1	1	8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		717.810.000	717.810.000
	3	27	3.27.	2	1	2	5	1	2	1	1	37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		9.750.000	9.750.000
	3	27	3.27	2	1	0							Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	530.510.000	710.510.000	180.000.000
	3	27	3.27	2	1	2							Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	530.510.000	710.510.000	180.000.000
	3	27	3.27.	2	1	2	5	1					BELANJA OPERASI	530.510.000	710.510.000	180.000.000
	3	27	3.27.	2	1	2	5	1	2				Belanja Barang dan Jasa	530.510.000	710.510.000	180.000.000
	3	27	3.27.	2	1	2	5	1	2	1			Belanja Barang	530.510.000	710.510.000	180.000.000

NO	KODE REKENING											URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2											3	4	5	6(5-4)	
	3	27	3.27	2	1	2	5	1	2	1	1		Belanja Barang Pakai Habis	530.510.000	710.510.000	180.000.000
	3	27	3.27	2	1	2	5	1	2	1	1	39	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	530.510.000	710.510.000	180.000.000
7	DINAS PERKEBUNAN												2.973.762.500	3.473.762.500	500.000.000	
	3	27	3.27	0	0	0							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2.973.762.500	3.473.762.500	500.000.000
	3	27	3.27	2	0	0							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.973.762.500	3.473.762.500	500.000.000
	3	27	3.27	2	1	0							Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.973.762.500	3.473.762.500	500.000.000
	3	27	3.27	2	1	4							Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	2.973.762.500	3.473.762.500	500.000.000
	3	27	3.27	2	1	4	5	1					BELANJA OPERASI	2.973.762.500	3.473.762.500	500.000.000
	3	27	3.27	2	1	4	5	1	2				Belanja Barang dan Jasa	2.973.762.500	3.473.762.500	500.000.000
	3	27	3.27	2	1	4	5	1	2	1			Belanja Barang	2.973.762.500	3.473.762.500	500.000.000
	3	27	3.27	2	1	4	5	1	2	1	1		Belanja Barang Pakai Habis	2.973.762.500	3.473.762.500	500.000.000
	3	27	3.27	2	1	4	5	1	2	1	1	39	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.973.762.500	3.473.762.500	500.000.000
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN												34.000.000	787.900.000	753.900.000	
	3	30	3.31	0	0	0							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	34.000.000	637.900.000	603.900.000
	3	30	3.31	4	0	0							PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	34.000.000	637.900.000	603.900.000
	3	30	3.31	4	1	0							Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	34.000.000	637.900.000	603.900.000

NO	KODE REKENING											URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2											3	4	5	6(5-4)	
	3	30	3.31	4	1	2						Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	34.000.000	637.900.000	603.900.000	
	3	30	3.31	4	1	2	5	1				BELANJA OPERASI	34.000.000	637.900.000	603.900.000	
	3	30	3.31	4	1	2	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	34.000.000	112.000.000	78.000.000	
	3	30	3.31	4	1	2	5	1	2	2		Belanja Jasa	34.000.000	112.000.000	78.000.000	
	3	30	3.31	4	1	2	5	1	2	2	4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	34.000.000	112.000.000	78.000.000	
	3	30	3.31	4	1	2	5	1	2	2	4	37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	34.000.000	112.000.000	78.000.000
	3	30	3.31	4	1	2	5	1	4			Belanja Subsidi	0	525.900.000	525.900.000	
	3	30	3.31	4	1	2	5	1	4	3		Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0	525.900.000	525.900.000	
	3	30	3.31	4	1	2	5	1	4	3	1	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0	525.900.000	525.900.000	
	3	30	3.31	4	1	2	5	1	4	3	1	1	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0	525.900.000	525.900.000
	3	31	3.31	0	0	0						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	150.000.000	150.000.000	
	3	31	3.31	2	0	0						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0	150.000.000	150.000.000	
	3	31	3.31	2	1	0						Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	0	150.000.000	150.000.000	
	3	31	3.31	2	1	5						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0	150.000.000	150.000.000	
	3	31	3.31	2	1	5	5	1				BELANJA OPERASI	0	150.000.000	150.000.000	
	3	31	3.31	2	1	5	5	1	4			Belanja Subsidi	0	150.000.000	150.000.000	
	3	31	3.31	2	1	5	5	1	4	3		Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0	150.000.000	150.000.000	
	3	31	3.31	2	1	5	5	1	4	3	1	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0	150.000.000	150.000.000	
	3	27	3.27	2	1	4	5	1	2	1	1	1	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0	150.000.000	150.000.000

NO	KODE REKENING											URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2											3	4	5	6(5-4)
9	BADAN KEUANGAN DAN ASET												9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	0	0	0						KEUANGAN	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	0	0						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	1	0						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	1	9						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	1	9	5	3				BELANJA TIDAK TERDUGA	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	1	9	5	3	1			Belanja Tidak Terduga	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	1	9	5	3	1	1		Belanja Tidak Terduga	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	1	9	5	3	1	1	1	Belanja Tidak Terduga	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	1	9	5	3	1	1	1	Belanja Tidak Terduga	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872

No	PERGOLAH	PARAF
1	KASUBBID PENYUSUNAN APBD	
2	KEPALA BIDANG ANGGARAN	
3	SEKRETARIS BKAD	
4	KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM SETDA PROV.SULUT	
5	KEPALA BIRO HUKUM	
6	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
7	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8	Pj. SEKRETARIS DAERAH	
9	WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	
10	GUBERNUR SULAWESI UTARA	Mohon ditandatangani

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

NO	KODE REKENING											URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
1	2											3	4	5	6(5-4)	
9	BADAN KEUANGAN DAN ASET												9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872	
	5	2	5.02	0	0	0							KEUANGAN	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	0	0							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	1	0							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	1	9							Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	1	9	5	3					BELANJA TIDAK TERDUGA	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	1	9	5	3	1				Belanja Tidak Terduga	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	1	9	5	3	1	1			Belanja Tidak Terduga	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	1	9	5	3	1	1	1		Belanja Tidak Terduga	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872
	5	2	5.02	2	1	9	5	3	1	1	1	1	Belanja Tidak Terduga	9.508.656.098	6.328.125.226	-3.180.530.872

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY